

TANGGALKAN KHALIFAH DI BUMI INI: Membaca Narasi Sukarno tentang Sekularisme Turki

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
email: almakin3@gmail.com

Abstract: *This article attempts to observe Sukarno's article about the separation between religion and state" published in Panji Islam in 1940. Sukarno's thought is still relevant to discuss up to now in Indonesian because some conservative and radical groups of Muslim have given the louder voices to the government demanding the system of caliphate state and rejecting free democracy by intimidation which ironically seemed to be given to these groups to rise. More than fifty years ago, Sukarno clearly argued that caliphate system of leadership in Muslim society was no longer relevant and even outdated. Sukarno took the case of Turkey, through which he hailed Mustafa Kemal Ataturk's efforts in abolishing the outdated Ottoman caliphate in order to build the modern democracy of Turkey, which was able to address more real challenges facing Muslim society. Sukarno explained clearly that the separation of religion and state in Muslim society was needed to make the survival of both religion and state. He also presented history of Turkey in his argument that caliphate system of governing was not pure Islamic one, as it was an evolution of older system of government from the ancient Greco-Byzantium, in which religion played a vital role to legitimate the power of some emperors. Let alone, the history of Turkey had witnessed the weakening caliphate system of Ottoman in which religion and politics mingled so that Turkey was not able to control the vast Islamic territory, which ultimately its population rebelled the empire. Sukarno's reading and rhetoric in narrating Turkey was unique as he contextualized the Turkish history into Indonesian situation in the pre-independent period. Sukarno's interpretation of Islam, history, and politics could serve as a foundation for those who sought the nature of religion and state relation and reminded those who recalled caliphate system during the reform era. Indeed, caliphate system has no place today in Indonesia as relentlessly told by Sukarno more than fifty years ago.*

الملخص: حاول هذا المقال إعادة القراءة لمقال كتبه سوكارنو في صحيفة «لواء الإسلام» سنة 1940م تحت العنوان «لما فصلت تركيا بين الدين والدولة». ولا يزال هذا المقال يواكب السياق الإندونيسي بما فيها من ظاهرة الأصولية والمحافظه على التراث، ومن مطالباتها إقامة الخلافة والرد على الديمقراطية الحرة. ردّ سوكارنو منذ بضع وخمسين سنة نظام الخلافة القديمة. رأى سوكارنو هذا في قضية مصطفى كمال أتاترك الذي قضى على الخلافة وأقام الديمقراطية في تركيا، وقال «إن فصل الدين عن الدولة» أمر لازم لتقدم كل منهما. و بالإضافة ذكر تاريخ الخلافة أنها كنظام تمييزي - كنظام الدولة - بقيم من اليونان والروم حيث أن الدين أداة لشرعية القوة السياسية لهؤلاء الامبراطور. يظهر من هذا، أن حجة سوكارنو عن الإسلام والتاريخ والسياسة يمكن أن تكون أسسا لمن أراد معرفة الارتباط بين الدين والدولة.

Abstrak: Artikel ini membaca kembali tulisan Sukarno yang berjudul “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dan Negara” terbit di Panji Islam, 1940, yang tetap relevan dalam konteks Indonesia yang saat ini menyaksikan penguatan radikalisme dan konservatisme, diantara tuntutan adalah penegakan khalifah dan penolakan demokrasi bebas. Lebih dari lima puluh tahun yang lalu Sukarno menolak sistem khalifah yang kuno. Sukarno melihat ini dalam kasus Turki dengan Mustafa Kemal Ataturk yang membubarkan khalifah dan menegakkan demokrasi di sana. Bagi Sukarno pemisahan agama dan negara merupakan keniscayaan untuk kemajuan keduanya. Sukarno juga menghadirkan sejarah khalifah bahwa itu hasil dari perpaduan dengan Yunani-Romawi dimana agama bermanfaat untuk legitimasi kekuasaan para kaisar. Di sini ditunjukkan bahwa argument Sukarno tentang Islam, sejarah dan politik bisa menjadi fondasi bagi yang ingin mengetahui relasi agama dan negara.

Keywords: Sukarno, Turki, Indonesia, sekularisasi, khilafah.

PENDAHULUAN

Di tahun-tahun terakhir ini setelah era jatuhnya presiden Soeharto sebagai penguasa rezim Orde Baru, kita saksikan naiknya tingkat radikalisme dan konservatisme di beberapa kelompok dalam Islam. Ini karena setelah jatuhnya Soeharto yang cukup lama berkuasa dan mengontrol wilayah politik secara otoriter, keadaan negeri seperti bebas tanpa kendali. Situasi ini juga terjadi karena bersamaan

dengan menguatnya globalisasi dalam bidang media, internet, dan sarana komunikasi. Revolusi media dan teknologi memudahkan saling mempengaruhi unsur dalam dan luar, bahkan bercampur dan menciptakan iklim baru. Dahulu pada tahun 1980an, saat Orde Baru berjaya, Islam di Indonesia sepertinya menyetujui tesis para sarjana Barat dan Indonesia tentang keunikan dan karakteristik Islam yang berbeda dengan Islam di tempat lain, seperti Timur Tengah atau Pakistan India.¹ Islam dan budaya lokal menyatu padu, sehingga menciptakan keselarasan yang menawarkan model Islam yang tidak bisa dijumpai di bumi lain. Islam Indonesia merupakan Islam yang ber-Pancasila, dengan memegang adat dan istiadat, namun tetap berislam. Budaya dan agama menjadi satu dan menawarkan tafsiran lokal. Namun, setelah era demokrasi dengan ditandai runtuhnya Orde Baru, keislaman atau Islamisme² sebagai paham dan ideologi menguat dan semakin lantang bersuara di ranah publik.³

Setelah reformasi bangsa Indonesia seperti kehilangan pegangan dalam berideologi, dan mencari justifikasi dalam agama dengan pengertian pencarian yang sangat fundamen. Maka tak heran “pencarian” itu menjadi gerakan dan ideologi “fundamentalisme,” yakni kembali ke akar keislaman itu sendiri sebagai identitas baru. Islam yang telah berakar dengan budaya lokal Nusantara, seperti gerakan NU dan Muhammadiyah, yang menerima Pancasila sebagai

¹Clifford Geertz, *The Religion of Java* (Glencoe, Ill.: The Free Press, 1960); Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi: dalam Masyarakat Jawa*, ed. Bur Rasuanto, trans. Aswab Mahasin (Jakarta: Pustaka Jaya, 1983); Clifford Geertz, *Islam Observed: Religions Development Marocco and Indonesia* (New Haven [etc.]: Yale University Press, 1968).

²“Islam” adalah agama yang lahir sejak abad tujuh Hijriyah. “Keislaman” adalah unsur-unsur Islam yang berkembang dalam berbagai budaya dan peradaban Islam selama satu setengah milenium. “Islamisme” adalah paham baru konservatif yang berargumen tentang politik Islam, yang menekankan totalitas dalam ekonomi, politik, dan kehidupan sosial. Islamisme lahir pada tengah abad dua puluh (misalnya Sayyid Qutb dan Abu A’la Maududi). Di Indonesia paham ini berkembang setelah reformasi. Gerakan baru Islamisme tercermin dalam PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dalam bentuk lunak dan pragmatis, HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dalam bentuk lebih konsisten, dan gerakan-gerakan konservatif dan radikal lainnya. Untuk referensi, lihat footnote 3.

³Al Makin, “Benedict XVI and Islam: Indonesian Public Reactions to the Regensburg Address,” *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (2009): 409–21; Al Makin, *Challenging Islamic Orthodoxy, Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia* (Dordrecht, Holland; Cinnaminson [N.J.], U.S.A.: Springer, 2016); Al Makin, “Revisiting Indonesian Public Reactions against Danish Cartoons Depicting Prophet Muhammad,” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 195–229.

ideologi negara, tidak memuaskan kelompok tertentu, seperti HTI (Hisbut Tahrir Indonesia) yang mengusung faham “khilafah.” Dengan faham itu, semangat keagamaan dan politik diidamkan kembali pada masa awal Islam yang mereka bayangkan, yaitu masa khalifah abad tujuh sampai sembilan belas, ketika khalifah Turki Utsmani jatuh. Mereka membayangkan homogenisasi, kesatuan, dan penyatuan Islam secara politik, sosial, dan keagamaan. Penulis berargumen dalam banyak karya, bahwa ini tidak mungkin secara historis dan sosiologis. Kenyataannya, Islam dalam praktek dan manifestasi budaya manusia Muslim itu tidak pernah satu dan seragam. Ruang dan waktu mempengaruhi Islam, sehingga kehidupan sosial dan politik Muslim itu berbeda-beda corak sesuai dengan semangat lokalitas. Benar adanya bahwa Islam satu, Nabi satu, Qur’an, tauhid itu satu, tetapi Islam dalam budaya manusia terwujud dalam konteks dan tafsir yang berwarna-warni. Islam, sebagaimana tradisi agama-agama lain di dunia ini, mengikuti budaya, tempat, dan waktu para pemeluknya.⁴

Artikel ini berusaha mengetengahkan topik yang aktual yang selama ini dibahas, dalam rangka perdebatan tentang khilafah dan Islam. Artikel ini menawarkan kembali untuk membaca dasar intelektualitas dan berpikir dengan berpijak dari khazanah Indonesia sendiri, yakni karya pemimpin dan pemikir Indonesia itu sendiri.⁵ Perdebatan tentang khalifah kembali menguat setelah banyak pihak merindukan sistem itu lagi di era reformasi ini. Terutama HTI terus menerus meneriakkan sistem itu dengan lantang, bahwa khilafah adalah solusi dari segala keruwetan bangsa ini. Khilafah adalah sistem yang paling islami dan itulah solusinya. Syariah adalah inti ajaran Islam, maka perlu kembali ke syariah dan khilafah untuk menjadi Muslim yang *kaffah* (sempurna). Kelompok-kelompok radikal dan konservatif, seperti Jama’ah Islamiyah (JI),⁶ juga bercita-

⁴Al Makin, *Anti-Kesempurnaan: Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002); Al Makin, *Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia* (Yogyakarta: Suka Press, 2016).

⁵Al Makin, “Are there any Indonesian philosophers? Dealing with a common question and possible answers,” *Ulumuna* 20, no. 1 (2016): 1–28.

⁶Zachary Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror* (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003); Zachary Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia* (London; New York: Routledge, 2007); Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (Ithaca, N.Y.: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, 2006).

cita menegakkan khalifah yang meliputi wilayah Asia Tenggara, dengan kekerasan atau dengan perdamaian.

Ideologi khilafah adalah bagian dari konservatisme baru. Dua kelompok konservatif Islam utama di Indonesia yang mengambil jalur berbeda: satu kelompok dengan kekerasan yang melahirkan terorisme, seperti JI,⁷ kelompok lain aktif dalam ruang publik dengan kampanye khilafah, seperti HTI. Ada juga konservatisme lain (walaupun tidak mendukung program khilafah), tetapi mengupayakan agenda Syariah dan Islamisme (seperti PKS/Partai Keadilan Sejahtera) dalam demokrasi Pancasila serta mengikuti prosedur demokrasi,⁸ dan kelompok yang mengintimidasi publik dengan gerakan-gerakan *sweeping* dan sering turun ke jalan dengan massa besar, seperti FPI.⁹ Patut dicatat, tidak semua kelompok konservatif dan radikal menawarkan sistem khilafah, walaupun khilafah merupakan bagian dari konservatisme.

Kembali ke Akar

Artikel ini mengajak pembaca kembali ke akar khazanah Nusantara, apa yang sudah terpikirkan pada saat bangsa ini belum merdeka, ketika para pemimpin kita berbicara tentang Indonesia yang belum berwujud.¹⁰ Isu khilafah sudah lama dibahas dan dikupas secara mendalam, ini perlu dicatat dan diketahui generasi masa kini. Tentu ini adalah ajakan agar kita tidak larut dalam diskusi khilafah mulai dari nol lagi (mencari dalil dari Kitab Suci), tetapi jika diskusi khilafah diteruskan hendaknya juga kembali ke fondasi awal, bagaimana sikap para pendahulu terhadap isu ini. Bahwa diskusi khilafah sudah dilaksanakan di Indonesia bahkan sebelum Indonesia itu sendiri berdiri. Maka kritik pertama pada diskusi khilafah era

⁷Abuza, *Political Islam and Violence in Indonesia*; Abuza, *Militant Islam in Southeast Asia*; Hasan, *Laskar Jihad*.

⁸Ahmad Norma Permata, "Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia," *Asien* 109 (2008): 22–36.

⁹Woodward M et al., "The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia," *Contemporary Islam : Dynamics of Muslim Life* 8, no. 2 (2014): 153–71; Jajang Jahroni, *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003* (Bangkok, Thailand]; Chiang Mai, Thailand: Asian Muslim Action Network; Silkworm Books, 2008); Ismail Hasani and Bonar Tigor Naipospos, *Wajah Para "Pembela Islam": Radikalisme Agama dan Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010).

¹⁰Lihat artikel Al Makin, "Are there any Indonesian philosophers?".

reformasi adalah keterputusan diskusi itu dengan khazanah yang sudah ada di Indonesia. Jargon khilafah masa kini itu *ahistoris*, tidak sadar sejarah, dan tidak sadar sumber sebelumnya, seperti HTI dan kelompok-kelompok internasional lain. Ada lompatan berpikir yang sangat berarti dan itu menjadikan argumen khilafah tidak berpijak di bumi. Ide khilafah adalah ide impor dari luar (Timur Tengah) yang tidak disesuaikan dengan watak Nusantara.

Artikel ini meninjau kembali tentang diskusi khilafah yang sudah ditulis oleh pemimpin Indonesia, yaitu Sukarno, proklamator yang prolifk dan berpengaruh pada masanya. Sukarno sebagai tokoh besar sudah sangat banyak didiskusikan dari biografinya,¹¹ sepak terjangnya dalam politik,¹² pemikirannya,¹³ dan kejatuhannya yang misterius karena bersamaan dengan perubahan era Orde Lama ke Orde Baru.¹⁴ Setelah reformasi, peran Sukarno juga dibahas di publik dan diskusi tentang pikiran-pikirannya di Indonesia juga lebih terbuka. Buku-buku tentang Sukarno dicetak ulang, dan banyak studi tentang tokoh ini. Waktu Orde Baru semua terkait dengan Sukarno dilarang dan disensor. Artikel ini tidak membahas secara menyeluruh tentang Sukarno, tetapi khusus membaca tulisan dia ketika muda dan masih bercita-cita memerdekakan Indonesia. Diskusi tentang khilafah sudah demikian jauh dibahas dan Sukarno tidak serta merta kembali ke arah fundamentalnya, yaitu Quran dan Hadits sebagaimana doktrin para Islamis konservatif dan radikal akhir-akhir ini. Sukarno mengajak kembali menengok ke sejarah peradaban Islam, khususnya sang proklamator menceritakan sejarah Turki. Ia kupas sejarah itu dan bagaimana kekhalifahan Turki Utsmani

¹¹C. L. M. Penders, *The Life and Times of Sukarno* (Rutherford [N.J.]: Fairleigh Dickinson University Press, 1974); John D. Legge, *Sukarno* (Lanham: Editions Didier Millet, 2012); J. D. Legge, *Sukarno: a Political Biography* (New York: Praeger, 1972).

¹²Bernhard Dahm, *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit: Werdegang und Ideen eines Asiatischen Nationalisten* (Frankfurt a.M.; Berlin: Metzner, 1966); Bernhard Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (Ithaca [N.Y.]: Cornell University Press, 1969).

¹³Kahin, Audrey, "Natsir & Sukarno: Their Clash over Nationalism, Religion and Democracy, 1928-1958," in *Encountering Islam: The Politics of Religious Identities in Southeast Asia*, ed. Yew-Foong, Hui (Institute of Southeast Asian Studies, 2012), 191-217, <http://203>.

¹⁴John Roosa, *Pretext for Mass Murder the September 30th Movement and Suharto's Coup D'état in Indonesia* (Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006).

ini jatuh dan bergantilah republik modern Turki di mana pemisahan agama dan negara menjadi suatu keharusan. Sukarno ungkap dengan bahasa yang penuh retorik, segar, menghibur, dan energik. Artikel ini berusaha menyumbang pemahaman dan apresiasi terhadap pemikiran Sukarno, yang selama ini tidak dilakukan. Dalam tulisan-tulisan Barat banyak yang tidak berusaha mengapresiasi, selain dari sepek terjang politik dan aktivismenya, sementara dalam tulisan orang-orang Indonesia hanya sekedar mengagungkan. Tulisan ini berusaha menghargai Sukarno sebagai penulis, pemikir, dan lengkap dengan retorika dan sumbangannya.

Sukarno pada tahun 1940 menulis dua artikel utama tentang Islam dalam *Panji Islam*, yang pertama berjudul “Me-“mudakan”-kan Pengertian Islam”¹⁵ dan “Apa sebab Turki memisah agama dan negara?”¹⁶. Dua artikel itu merupakan sumbangan reformasi Islam Indonesia pra-kemerdekaan oleh Sukarno muda. Tokoh muda yang penuh semangat menggelora, berjiwa nasionalisme, berpegang pada tradisi agama, dan berprinsip sosialisme. Sukarno menentang pemerintahan kolonial Belanda dan dengan pendidikan yang diperolehnya dari kebijakan politik etis, akhirnya ia bersama kawan-kawannya membawa perubahan di bumi Indonesia itu. Dalam artikel pertama Sukarno menunjukkan watak kemajuan Islam, sedangkan artikel kedua menunjukkan arah politik yang akan dia tempuh bersama dengan para pemimpin masa itu. Di artikel pertama sudah ia tunjukkan kemajuan dan perubahan dalam Islam dan mendorong bagaimana peran Islam sebagai agama yang mampu bangkit bersama bangsa. Dia mengutip banyak karya maju pada zamannya di antaranya adalah Essad Bey, Farid Wajdi, dan gerakan Wahabi yang dinilai mampu mengikis bidah dan takhayul. Sukarno mendukung pembukaan kembali pintu ijtihad dan pembaharuan dan menentang kekolotan dan kejumudan, sebagaimana Islam pembaharuan ketika itu sedang berjibaku. Artikel kedua, yang menjadi fokus kita dalam artikel ini, adalah tentang politik dan sekularisasi. Untuk mendalaminya mari kita lihat bagaimana artikel itu ditulis.

¹⁵Sukarno, “Me-‘Muda’-Kan Pengertian Islam,” in *Dibawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), 369–402.

¹⁶Sukarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dan Negara,” in *Dibawah Bendera Revolusi*. (Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005), 403–47.

Audiens

Pertimbangan pertama dalam membaca artikel Sukarno adalah audiens atau pembaca yang menikmatinya, yaitu bangsa yang belum merdeka dan masih terkungkung pikiran kolonialisme, itulah yang dituju. Sukarno berbicara atas nama pemimpin yang maju dan mempromosikan ide-ide segar untuk bangsa yang belum terbebaskan. Sukarno adalah pemikir dan intelektual tetapi dalam tulisan ini tidak atas nama cendekiawan dalam bidang apa pun dari universitas. Ia adalah pemikir yang mengabdikan pada publik, sedangkan cendekiawan keilmuan hanya mengabdikan pada pengetahuan. Sukarno bukanlah ilmuwan dalam pengertian yang akan mengembangkan ilmu pengetahuan seperti dewasa ini yang diukur dengan indeks dan sitasi tulisan di jurnal. Tetapi Sukarno mengembangkan pemikiran untuk khalayak dan perjuangan. Ilmu pengetahuan Indonesia waktu itu belum terbentuk, dan Indonesia pun belum lahir, jadi salahlah jika menghakimi Sukarno bahwa ia tidak ilmiah. Kelebihannya adalah luasnya pengetahuan yang dimiliki. Hal yang wajar masa itu, era di mana keemasan intelektual Indonesia mencapai puncaknya, adalah masa pribumi terdidik dengan bacaan yang luas lalu menjadi pemimpin dalam karya tulis. Mereka menguasai bahasa Eropa minimal Belanda, Inggris, Jerman dan Prancis. Kaum terdidik kala itu adalah kaum terhebat sepanjang sejarah Indonesia. Mereka meramu berbagai tradisi, antara Barat (Belanda) dan lokal masing-masing sehingga melahirkan ideologi yang cukup akomodatif. Sukarno merupakan salah satu contoh yang nyata dari usaha ini.

Audiens ini dijelaskan juga oleh Sukarno bahwa penulisan artikel ini atas permintaan pembaca:

Sesudah PI (*Panji Islam*) no. 13 itu melayang ke kalangan publik, maka saya dari sana sini, antaranya dari seorang sahabat karib di kota Jakarta, saya mendapat permintaan akan menulis lebih banyak tentang soal agama dan negara di negeri Turki itu dan tulisan saya yang sekarang ini haruslah dianggap sebagai memenuhi permintaan-permintaan itu.¹⁷

Sumber dan Gaya

Sukarno mengambil sumber dari pengamatan keseharian Hindia-Belanda ketika itu. Tulisan itu memang diperuntukkan untuk merefleksikan bagaimana keadaan zamannya, walaupun

¹⁷Ibid., 403.

menggunakan Turki sebagai interlokutor. Maka, sumber pertama tentu kontemplasi dia sendiri, dari pengamatan dan polemik dengan teman-temannya. Terutama artikel sebelumnya “Me-“muda”-kan pengertian Islam”, Sukarno berpolemik dengan Mas Mansur. Sumber selanjutnya hanya berfungsi sebagai interlokutor saja, penyampai dan media untuk menyampaikan pesan kepada bangsanya sendiri. Sumber-sumber yang dia kutip, karena tidak bersifat ilmiah dan kecendekiawanan, tidaklah diterangkan secara gamblang. Ia menyebutkan nama-nama pengarangnya dan kadang-kadang juga nama buku. Tetapi tidak disebut halaman dan volume berapa dan bagianmana.

Adapun sumber-sumber yang dirujuk dalam artikel tersebut sebagai berikut:

Kemal Ataturk, pidato-pidatonya

Halide Edib, *Turkey faces West*¹⁸

Zia Keuk Alp, tanpa menyebut sumber

Stephan Ronart, *Turkey Today*¹⁹

Engelhardt, *Angora Constantinople*

Frances Woodsmall, *Moslim Women enter a new World*²⁰

Harold Armstrong, *Turkey in Travail*²¹

Mahmud Essad Bey, tanpa menyebut buku²²

Abd al-Razik, *Al usul wal hukum*²³

Farid Bey, interview wartawan

Noordman, tanpa menyebut buku

Cara mengutip dan merujuk dalam artikel itu, sebagaimana juga artikel lain, tidak lah jelas dan terang; tidak secara jelas berupa rujukan ilmiah modern, seperti *footnote*, *bracket*, atau model standar lainnya.

¹⁸Halide Edib Adivar, *Turkey Faces West* (New Haven; London: Yale University Press; H. Milford, Oxford University Press, 1930).

¹⁹Stephan Ronart, *Turkey Today* (London: Robert Hale, 1938).

²⁰Ruth Frances Woodsmall, *Moslem Women Enter a New World* (New York: Round table Press, 1936).

²¹Harold Courtenay Armstrong, *Turkey in Travail* (London: Lane, 1925).

²²Essad and Elsa L Talmey, *Blood and Oil in the Orient* (New York: Simon and Schuster, 1932); Essad and Helmut Ripperger, *Mohammed: A Biography* (New York; Toronto: Longmans, Green and Co., 1936).

²³Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Usul al-Hukm: Bahth fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayyah, 1966).

Artikel Sukarno itu tergolong panjang, tetapi tidak menggunakan pembagian bab dan sub-bab, sehingga pembaca seperti lelah dengan informasi yang begitu banyak dan bahasa yang berapi-api. Tetapi jika artikel itu dilihat dari temanya, maka akan bisa dijumpai urutan sebagai berikut.

Pertama Sukarno mengetengahkan sumber-sumbernya sendiri, ia sebut penulis yang ia kagumi dan baca. *Kedua* adalah pembuka tentang tema seputar kontroversi sekularisasi Turki, yaitu tuduhan yang menganggap bahwa Turki telah menghancurkan Islam dengan tindakan memisahkan agama dan negara. Sukarno di sini berargumen justru dengan pemisahan seperti itu Turki menghidupkan Islam dengan memisahkan keduanya supaya masing-masing berkembang. *Ketiga*, alasan-alasan yang menguatkan pemisahan agama dan negara, termasuk mengutip kata-kata Kemal Ataturk dan juga kasus Abd al-Razik, kata-kata Noordman, dan pidato Zia Keu Kalp. *Keempat*, Sukarno membedah sejarah Turki yang sangat panjang, dari awal, sebelum datangnya Islam, berdirinya khilafah, dan menurunnya sistem itu. Ia bercerita bagaimana Islam masuk ke Turki dan berangsur menjadi penguasa Islam lewat sistem khilafahnya. Sukarno berargumen bahwa khilafah Islam telah bercampur dengan urusan politik dan dengan begitu mengurangi unsur khusus agama dan mengganggu stabilitas politik negara. Sukarno juga membahas tentang pengaruh kebudayaan Grik (Yunani)-Byzantium (Romawi) terhadap sistem khilafah Islam, yang diteruskan oleh Turki Usmani. Keruntuhan Byzantium dan kemunculan kekuatan Islam di Damaskus, Baghdad, Mesir, Spanyol lalu Turki ia paparkan. Di sini Sukarno banyak mengutip Helida Edib dalam banyak hal. Keruntuhan khalifah juga dibahas panjang lebar oleh Sukarno. Kekhalifahan tidak bisa lagi menopang negara Turki yang luas itu. Akhirnya Mustafa Kemal Ataturk mengambil alih dan memisahkan unsur agama dari negara dengan berakhirnya kekuatan khalifah dan sultan secara politik. Setelah itu Sukarno menguatkan argumen tentang pentingnya memisahkan negara dan agama. Namun itu semua bisa ditelaah dengan hati-hati, karena retorika Sukarno seperti dalam pidatonya, berapi-api, berulang-ulang, dan banyak bunga-bunga bahasa. Retorika yang pas untuk orang yang bersemangat dalam membakar jiwa nasionalisme dan kebangkitan bangsa.

Penutupnya pun dengan retorika seperti ini:

Benar atau salahnya ia (Ataturk) punya perbuatan haibat itu bagi Islam—itu sebenarnya bukan kitalah yang dapat menjadi hakim. Yang dapat menjadi hakim baginya hanyalah sejarah kelak kemudian hari! Sejarah inilah yang kelak memutuskan, Kemal durhaka atau Kemal mahabijaksana!²⁴

Retorika yang menantang audiens, dan mengajak berpikir bersama. Proposisi-proposisi yang digunakan mengundang perdebatan dan rasa ingin tahu. Namun Sukarno sangatlah kontekstual, semua deskripsi dan analisisnya tidak bisa dipisahkan dari konteks Indonesia waktu itu. Membaca tanpa konteks akan menghilangkan makna dan keindahan tulisan Sukarno.

Hendaknya, membaca naskah Sukarno tidak hanya mencari argumennya, tetapi juga menikmati retorika semangat yang ia bangun berdasarkan fakta-fakta. Gayanya meliuk-liuk dengan mengaitkan antara fakta dan sejarah Turki dengan interpretasi personal dan juga konteks keindonesiaan. Bahasanya lisan dan tak terasa mengikuti percakapan. Jadi pembaca akan kecewa jika hanya mencari keakuratan sejarah dan alasan kuat pentingnya negara memisahkan diri dari agama, tetapi juga patut dilihat dari gaya sastra dan komunikasi pidato di podium. Sukarno memang komunikatif, dan rupanya itulah yang lebih dipentingkan daripada argumen itu sendiri. Berkali-kali Sukarno menyatakan dan berusaha berkomunikasi dengan audiens dalam tulisan seperti dalam khotbah bertatap muka. Misalnya pernyataan yang patut dilihat, “marilah kita “ambil” sejarah Turki itu lebih dulu secara kilat.”²⁵ Jadi menghadirkan sejarah tidak apa adanya, tetapi bagaimana mengambil pelajaran dari sejarah itu sendiri. Dan Sukarno tidak kronologis dalam paparannya, tetapi argumentatif.

Kontekstualisasi Sukarno terletak di bagian bagaimana menghadirkan fakta dalam konteks audiens. Dan Sukarno memang lihai dalam menggiring ke arah itu. Misalnya bagaimana istilah *sontoloyo* hadir dalam diskusinya,

Sebab apa? Sebab “agama”—agama *sontoloyo*!—selalu sedia mencarikan pengampunan buat perbuatan-perbuatan yang demikian itu, dan sebab negara tidak cukup kekuatan untuk menindas anggapan-

²⁴Sukarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara,” 447.

²⁵Ibid., 421.

anggapan *sontoloyo* itu. Seorang *amtenar* Turki yang nafsu *lauwamahnya* merasa gocang sekali oleh karena ia selalu terpaksa mencuri uang negeri untuk menyenangkan hati kepala-kepala di atasnya, pergilah kepada seorang mullah untuk menumpahkan punya rasa dosa itu.²⁶

Tentu ungkapan itu tidak menggambarkan Turki, dan *sontoloyo* juga bukan bahasa Turki, namun bahasa Jawa dan muatan istilah Jawa, dan gambaran itu lebih mengenai situasi Hindia-Belanda pada masa itu. Para *amtenar* yang dimaksud tampaknya juga para *amtenar* di bumi ini yang waktu itu sering dituduh sebagai pemihak Belanda dan menikmati status elite di tengah masyarakat terjajah. Dan kata-kata *sontoloyo* ditujukan kepada Islam dan Muslim di Nusantara bukan untuk Turki. Sejarah Turki sekali lagi hanyalah interlokutor, alat komunikasi dan media. Tetapi tujuan utama lebih pada masyarakat Hindia Belanda waktu itu.

Bagaimana Sukarno menceritakan puasa Ramadan di Turki, kita lihat dalam episode ini:

Tetapi bagaimana di Turki dulu? Semua kegiatan menjadi musnah, semua *vitaliteit er uit getrapt*, semua kesegaran jiwa binasa sama sekali oleh karena anggapan-anggapan salah, yang telah disebarkan oleh kaum tarikhah dan kaum kolot di kalangan rakyat itu. Di dalam bulan Ramadan itu dianggap berpahala besarlah kalau orang tidur malam hari dari magrib sampai subuh, tetapi banyak “baca-baca” atau teriak-teriak memuji Allah sampai parau kerongkongan atau banyak-banyak bicara wirid menurut tarikhah masing-masing.²⁷

Sekali lagi, kalimat-kalimat di atas lebih menggambarkan kritik Sukarno pada situasi yang ia hadapi di tanah airnya sendiri daripada di Turki. Kenyataan ini menegaskan bahwa Sukarno adalah seorang penafsir yang kontekstual dalam memakai deskripsi Turki seperti teater dalam tulisannya untuk menyindir masyarakat sendiri. Bagian berikutnya mari kita ikuti argumen Sukarno tentang sekularisasi dengan menggunakan interlukutor Turki.

Membebaskan Negara dan Agama

Sukarno menyusun argumen bersifat teatrical dan dialogis antara penulis dan pembaca, bukan monoton bahasa tulis. Semua nada mempertanyakan kembali para pembaca dan retorika hidup di

²⁶Ibid., 418.

²⁷Ibid., 416.

atas podium. Pertama Sukarno mencela tindakan gegabah, yang mengadili Turki tanpa melihat dan membaca buku yang akurat dalam menggambarkan keadaan Turki yang sesungguhnya: “Orang tuduh-tuduhkan dia barang yang bukan-bukan”. Yaitu kesalahan akibat dari konservatisme dengan menuduh “*zonder* melihat keadaan dengan mata sendiri, *zonder* mempelajari lebih dulu kitab-kitab yang beraneka warna, *zonder* pengetahuan dari segala keadaan-keadaan di Turki Muda itu.” Tuduhan itu berupa, “menghapuskan agama.” Kenyataannya, agama di sana diperbaharui dengan “sifat-sifat yang segar”. Sekularisasi di Turki tidaklah membenci atau bahkan mematikan agama. Agama di sana tidaklah tewas, sebagaimana yang dituduhkan orang *zonder* pengetahuan. Turki sekuler juga tidak anti Islam. Tetapi mengalami kemajuan bernegara dan beragama dengan cara lain.²⁸

Dalam membaca artikel Sukarno, bisa disimpulkan bahwa menurut Sukarno, di Turki yang baru, Islam dibebaskan dari negara, negara sudah tidak mencampuri urusan itu. Bukan anti terhadap Islam dan tidak pula mematikan peranan ini. Buktinya, orang masih terus bersembah yang; masjid berfungsi; dan aturan-aturan keagamaan masih berlaku. Tampaknya ini yang salah dalam kaca mata konservatisme lokal dan internasional kala itu, bahwa sekularisasi adalah penghapusan agama. Sukarno di sini tampak sudah menerawang bentuk negara Indonesia ke depan, bahwa sekularisasi yang dimaksud lebih menggambarkan ke depan Indonesia, di mana sekularisasi tidak berarti meninggalkan agama. Bahkan Sukarno mengungkap fakta sebaliknya, “Bukan sahaja di Turki, tapi dimana-mana sahaja, di mana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama di situ menjadilah ia satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan”.²⁹

Tesis utama Sukarno yaitu: Dengan tidak bercampurnya urusan agama dan negara, agama menjadi lebih maju dan merdeka karena agama menjadi urusan individu dan rakyat. Negara juga lebih maju karena tidak terkungkung oleh doktrin-doktrin agama. Mengutip ungkapan yang dinisbahkan pada Atatürk sendiri: “Saya merdekakan Islam dari ikatannya negara agar supaya agama Islam bukan tinggal agama memutarakan tasbih di dalam masjid sahaja, tetapi menjadilah

²⁸Ibid., 404.

²⁹Ibid., 405.

satu gerakan yang membawa kepada perjuangan.”³⁰ Maka, dengan begitu, negara terbebas dari kungkungan para pemimpin agama (Syekh Islam) yang dengan mudah mengatakan dan menghukum makruh, haram, serta halal. Hukum-hukum yang merepotkan itu pada dasarnya juga bukan Islam sejati. Tetapi Islam penafsiran para pemimpinnya. Di sisi ini, Sukarno masih apologetis, bahwa Islam yang benar bukan Islam yang dipraktikkan oleh mereka yang kolot. Sukarno, secara retorik masih mengatakan dan mencari sisi positif dan kekuatan agama ini. Dengan saling terbebas antara agama dan negara, keduanya menjadi kuat dan mandiri.

Sukarno menegaskan bahwa negara tidak perlu berbasis agama, tetapi yang terpenting adalah anggota-anggota dari pemerintahan dan perwakilan rakyatnya semua bermoral agama. Moral agama bisa masuk dan menjadi ruh negara yang tidak berbasis agama. Begitu Sukarno yang garis bawahi. Namun, disisi lain Sukarno juga menegaskan bahwa Islam tidak perlu ditolong dan ditopang negara, tetapi agama ini akan hidup sendiri secara mandiri, tanpa sokongan formal negara. Sukarno mengatakan dengan gaya retoriknya yang berulang-ulang “...oleh karena berkobar-kobarnya itu karena tenaga sendiri, semangat sendiri, usaha sendiri, ikhtiar sendiri, jerih payah sendiri, tekad dan jiwa sendiri *zonder* asuhannya negara, *zonder* pertolongannya negara, *zonder* perlindungannya negara.”³¹ Salah satu simbol yang diulang-ulang adalah, “merdekanya negara dari Islam, merdekanya Islam dari negara!”³²

Seperti artikelnya terdahulu dalam memudahkan Islam, Sukarno menengahkan bahwa simbol Islam tidaklah perlu. Yang penting adalah esensinya, atau apinya, bukan asap atau abunya. Tidak berlaku dan tidak berguna membanggakan sabda Allah menjadi *wet* (aturan); jika ekonomi, politik, dan administrasi rusak dan ketinggalan dalam suatu negara. Maka bagi Sukarno yang penting adalah praktiknya. Begitu juga di Turki. Semua gerakan mengarah pada esensinya bukan pada simbol negara Islam yang dibanggakan karena sudah berislam. Sukarno benar-benar menghapuskan argumen negara Islam sebagai simbol, tetapi yang penting adalah praktik sesuai dengan moral Islam. Turki yang dahulu kala khalifah menjadi sebutan sebagai *de*

³⁰Ibid.

³¹Ibid., 408.

³²Ibid., 410.

zeike man van Europa, si sakit dari Eropa. “Kita menamakan negeri kita negeri Islam, tetapi segala keadaan negeri kita itu menjadilah penghinaan Islam.”³³

Rasa cukup dan lengkap dengan negeri Islami menjadikan negeri itu juga tertutup untuk melihat dan merenung tentang negeri lain; kata Sukarno dalam sindirannya yang sinis: “... kita punya aturan-aturan sempurna, tak perlu ambil over apa-apa lagi dari negeri lain! Bukankah kita punya negara sudah negara Islam, kita punya *wet-wetnya* negeri adalah *wet-nya* syariat, kita punya negara adalah satu dengan Kitabullah,--buat apa menengok lagi ke negeri lain? Semua ilmu sudah terkandung di dalam Quran, buat apa menengok lagi kepada ilmu yang di Eropah?”³⁴ Ini menjadikan negeri Islamis itu enggan belajar dan membandingkan dengan kemajuan dan pengetahuan di luar negeri. Negara lalu “melemah,” dan “ia tak mau tabrakan dengan para Syekh-ul-Islam dan mufti-mufti.”³⁵ Antara pemuka agama dan negarawan tidak seiring dan sejalan ini juga menjadi faktor utama lemahnya negara yang bersandar pada agama.

Sistem Khalifah Hasil Campuran Sejarah

Argumen kedua yang kokoh dari tulisan Sukarno yaitu argumen sejarah. Dalam banyak halaman dia mencoba menerangkan bahwa sistem khilafah di Turki merupakan warisan dari sistem kuno Grik-Byzantium (Yunani-Romawi) sejak masa kaisar Justianus (527-565 M), kira-kira dua abad sebelum Islam itu sendiri lahir. Di situ, kata Sukarno, telah terjadi pemusatan kekuatan agama dan negara dengan sebutan, *caesaro-papisme*, tepatnya di kota Byzantium, Constantinopel.³⁶ Jadi di situlah letak penyatuan itu dalam tradisi Grik-Katolik. Namun pada saat munculnya Islam, kerajaan mengalami penurunan peran kekuasaannya di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Sukarno cukup realistis dan sadar sejarah, dan menekankan Islam berperan dalam pembentukan peradaban baru yang bercampur: “Campuran dari tiga peradaban: peradaban Grieks-Byzantium, ditambah dengan peradaban Arab (Islam), ditambah

³³Ibid., 409.

³⁴Ibid., 414.

³⁵Ibid., 417.

³⁶Nama kota Konstantinopel diambil dari nama kaisar *Constantin de Grote* untuk mengenang jasanya, karena beliau adalah kaisar Roma yang pertama kali secara resmi memeluk Kristiani.

dengan peradaban Iran!”. Kemudian campuran itu diterima begitu saja oleh umat Islam selanjutnya sebagai hukum dan syariat Islam semata.³⁷ Padahal asalnya peradaban itu dari sana: filsafat dan logika. Uniknya, ketika Baghdad, Daulah Bani Abbasiyah, runtuh sebagai kekuatan politik Islam yang megah, pusat Islam bertumbuh di daerah yang dulu dikuasai oleh tradisi Grieks-Byzantium tadi. Maka, tulis Sukarno, “oper” peradaban dan percampuran itu tidak bisa dielakkan lagi. Begini Sukarno menceritakan percampuran peradaban Timur dan Barat dalam tulisannya:

Byzantium tunduk dan patah di dalam tahun 1453 karena hantamannya Sultan Muhammad II yang di dalam tahun itu merebut kota Constantinopel, --tetapi, sesudah di bawah Sultan Murad I, seratus tahun terdahulu, banyaklah cara-cara pemerintahan dan cara-cara kemiliteran Byzantium dioper oleh negara Utsmaniah itu.³⁸

Islam di Turki menjadi bermuka tiga menurut Sukarno, yaitu muka sendiri, bermuka Grik, dan bermuka Iran. Pengaruh tradisi Darwis dan Syiah berasal dari dataran tinggi Iran. Model tentara berkuda (*sipahi*), berjalan kaki (*Janitsar*), sistem kehakiman, pemerintahan; semua asalnya milik Byzantium. Turki dalam hal ini radikal dalam mengoper zat-zat dari kanan dan dari kiri. Negeri jepitan yang terletak di tengah-tengahnya pertemuan pengaruh dari Barat dan dari Timur dengan berani menggabungkan unsur-unsur tadi. Turki kemudian menguasai dunia dan dunia Islam mengikuti alur dan cara berislam baru itu, bahkan seluruh Timur Tengah mengikutinya. Tanah Arab di bawah kekuasaan Turki Utsmani juga tak luput dari pengaruh percampuran tadi.

Orang haibat Salim I ini! Ia tidak puas menjadi Sultan sahaja. Ia angkat juga ia punya diri sendiri menjadi kalifah seluruh dunia Islam! Ia adalah satu sultan Turki yang pertama-tama mengambil oper sama sekali 100 % segala sifat-sifat *caesaro-papisme* dan cara pemerintahan Byzantium itu.³⁹

³⁷Menyetujui Sukarno, penulis juga sudah panjang lebar paparkan tentang sejarah rasionalitas dan teologi dalam peradaban masa lalu Islam baik itu di Baghdad maupun di Damaskus. Dalam sejarahnya, Islam mengomodasi unsur non-Arab dalam bidang politik, ilmu, sosial, dan budaya. Lihat juga Makin, *Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia* (Sumbernya belum lengkap, lihat footnote 4).

³⁸Sukarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama Dan Negara,” 425.

³⁹Ibid., 426.

Lalu sifat dinamis ini hilang ketika para pemuka agama mengambil alih dan menjadi *amtenar-amtenar*. Para syekh kemudian mengambil alih dan memberikan fatwa. Kekhalifahan Turki lalu menjadi negeri terbelakang. Kemudian negeri-negeri Eropa yang selama ini dikalahkan bisa merebut kemajuan. Pada tahun 1682 Turki sudah hampir merobohkan pintu Wina, namun pada abad delapan belas, daerah-daerah banyak yang hilang ditelan oleh Rusia dan Austria. Turki menjadi istilahnya “*de zieke man van Europa*.”⁴⁰ Kaum *amtenar* dan ulama menguasai panggung dan berhasil mendekati rakyat. Namun, Turki sudah menurun dan kehilangan pamornya. Daerah-daerah Timur Tengah bahkan juga melepaskan diri dari Turki (terutama masa Mahmud II tahun 1839).⁴¹ Kekhalifahan itu jelas menurun dan mengecil. Di sisi lain, para pemikir muda Turki banyak ke luar negeri untuk belajar dan menyuarakan pembaharuan. Namun pembaharuan jalan di tempat karena penolakan kaum ulama dan khalifah. Kejatuhan Turki ditambah lagi karena masalah finansial, di antaranya juga karena hutang ke Eropa. Manajemen yang jelek dan karenanya tidak bisa mengendalikan diri karena juga dalam keadaan perang. Kemunduran di puncaknya masa Abdul Hamid II yang membunuh banyak pembaruan kaum muda; sang penguasa lebih mendengar konservatisme dan ulama; banyak korban kediktatorannya.⁴² Maka Turki benar-benar menjadi “*de zieke man*.” Kemudian kaum Turki muda mengambil alih dengan mendirikan parlemen dan mengakhiri era absolutisme Abdul Hamid II.⁴³ Dalam situasi yang tidak menentu Sukarno menceritakan kepahlawanan Mustafa Kemal Pasya:

Maka, di dalam keadaan yang demikian itulah datang tokoh raksasa Mustafa Kemal Pasya. Ia bersihkan restan kerajaan Ustmaniah itu dari musuh,--amboi, betapa kecilnya restan negeri ini kalau dibandingkan dengan luasnya negeri-besar di zamannya Salim I dan Sulaiman I yang melebar dari Magribi sampai Yaman dan Balkan itu,--dan ia adakan reorganisasi dan perobahan-perobahan di dalam negeri, yang menggemparkan seluruh dunia: ia pisahkan agama dari negara.⁴⁴

⁴⁰Ibid., 428.

⁴¹Ibid., 429.

⁴²Ibid., 431.

⁴³Ibid., 432.

⁴⁴Ibid., 433.

Heroisme Kemal Atatürk: Tanggalkan Khalifah

Analisis Sukarno jelas historis dan juga realistis bahwa negara tidak bisa diatur oleh agama, dan Turki adalah contoh yang nyata. Sukarno membayangkan kemerdekaan Indonesia yang belum terjadi ketika artikel itu ditulis dan sudah menolak sistem agama dalam negara yang mengatur dan menghambat kemajuan. Agama harus netral dan dijauhkan dari sifatnya yang diktatur ketika bercampur dengan politik. Bagi Sukarno, Kemal tidaklah anti agama, tidak pula melemahkan agama. Tetapi Kemal dan kawan-kawan merubah fungsi agama dari sebagai alat kekuasaan untuk dikembalikan kepada masyarakat. Kemal, menurut Sukarno, telah melakukan tiga hal:

Pertama, mematikan *caesaro-papisme*, sultan diberhentikan tetapi khalifah masih tetap diadakan; kedua, khalifah diberhentikan, tetapi Islam masih ditetapkan sebagai agama negara; dan ketiga melepaskan sama sekali agama itu dari tanggungan negara.⁴⁵

Narasi dramatis dan teatrikal Sukarno kembali menyapa pembaca dengan cerita ketika pertentangan antara Kemal dan para ulama di Turki. Konon, dewan nasional Turki menyelenggarakan rapat besar antara kaum ulama dengan Kemal. Kemal dengan pakaian kebesaran militer menghadapi mereka yang “gaek-gaek”.⁴⁶ Sedangkan para “gaek-gaek” itu berjubah panjang, berjanggut, dan berdalil sana dan sini. “Dengan cara yang menjemukan sekali mereka bicarakanlah soal itu, dalil-dalil tua dari kitab-kitab tua yang telah bercendawan menyusullah yang satu kepada yang lain, ratusan contoh dari sejarah kalifah-kalifah Baghdad dan Kairo dikeluarkanlah dengan tidak ada habis-habisnya.”⁴⁷

Kemal bertahan dengan mendengar, tetapi tidak sabar. Darahnya mendidih. Ia duduk dan mendengar semua kata-kata kuno yang zatnya sendiri para ulama sudah tidak paham lagi. “Haruskah ia sebagai *togog* duduk di situ sepanjang hari, sedang inilah saat-saat yang minta putusan kilat yang bisa menentukan nasibnya negeri Turki buat berabad-abad?” Tentu saja ini interpretasi teatrikal Sukarno. Tidak mungkin Kemal mengetahui tokoh dramatis wayang Jawa, *Togog*, yang menjadi simbol kelucuan dan kebodohan. Maka Sukarno menerangkan ini untuk audiensi Indonesia, tidak lagi

⁴⁵Ibid., 434.

⁴⁶Bahasa Melayu lama, artinya yang tua dan ketinggalan zaman.

⁴⁷Sukarno, “Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara,” 435.

murni Turki. Karena itu, lanjut Sukarno, Kemal tidak lagi sabar dan menunggu. Ia berdiri, gemetar, dan lantang berpidato:

Tuan-Tuan! Sultan Utsmaniah telah merebut kekuasaan dengan kekerasan senjata dari tangannya rakyat dan dengan kekerasan senjata pula sekarang rakyat ambil kembali kekuasaan itu. Sultanat musti dipisah dari khalifat dan musti dihapuskan! Dan itu pun akan sungguh terjadi, maupun Tuan-Tuan mufakat maupun Tuan-Tuan tidak mufakat. Malahan nanti bisa juga ada dari Tuan-Tuan yang kepalanya dipisahkan dari tubuh!

Di sini Sukarno menyebut cara diktator, sebelumnya Sukarno menyebut sistem kekhalifahan adalah sistem diktator. Namun ia juga mengakui bahwa Kemal adalah diktator lain, yang baik dan berjasa. Namun, ini lebih sebagai bentuk keberanian mengambil langkah dan sikap tegas di tengah krisis. Jadi paling tidak Sukarno mengakui adanya watak diktator dalam soal yang berbeda. Maka dari situlah lahirlah *jumhuriyat* Turki, dari kediktatoran melawan kemunduran, yang juga kemunduran dari kediktatoran.

Sukarno memberi argumen Islam sejati, yang tidak seperti mereka yang menuduh demokrasi sebagai sistem yang tidak Islami. Tetapi bagi Sukarno demokrasi lebih islami dari sistem khilafah itu sendiri. Begini kalimatnya; “Islam sejati adalah suatu *religieuse democratie*”. Khalifah yang ada di Turki sudah tidak memenuhi syarat itu, tidak *religieuse*. Pemimpin itu menurut Sukarno harus dipilih (*elektie*) dan pemimpin juga harus bertanggung jawab pada persoalan duniawi, tidak hanya ukhrawi. Pemimpin itu *electief* dan *werledlijk macht-hebbend*. Bagi Sukarno kekhalifahan pertama (empat khalifah rasyidun) dalam Islam masih termasuk *elektief* dan juga masih berkuasa tidak atas nama agama saja, tetapi atas nama rakyat. Namun, sejarah telah berubah, bahwa kekhalifahan sudah menjadi tradisi warisan dan keturunan. Dalam melihat sejarah, Sukarno juga realistis, bahwa terjadi lebih dari satu khilafah di dunia ini dalam satu masa, yaitu di Spanyol dan di Baghdad; Umayyah dan Abbasiyah berbarengan. Maka bagi Sukarno, kekhalifahan di Islam tidak pernah memenuhi syarat kekhalifahan itu sendiri. Semua khalifah adalah kerajaan bukan *elektief*. Kedua, kekhalifahan tidak semata bersifat duniawi, tetapi bercampurnya duniawi dan agama. Maka syarat untuk mematuhi kalifah sudah gagal dan masyarakat Islam tidak bisa lagi tunduk dalam kekhalifahan.

Kenyataannya, kekhalifahan Turki justru merugikan Islam itu sendiri, demikian simpulan Sukarno:

Juga di dalam tangannya sultan-sultan Usmaniah kalifah itu menjadi lah satu pangkat warisan anak dari bapak, satu pangkat *erfelijk*, satu pangkat turunan, yang tidak pernah dibenarkan oleh Islam sejati, yang menghendaki *religieuse democratie* itu! Apa lagi di tangannya sultan-sultan Usmaniah-lah yang kemudian, sultan-sultan hanya “ayam jantan *zonder* bulu” sahaja, *zonder* kekuasaan, *zonder* tenaga-dunia yang *riil*; maka nyatalah kekhalifahan itu bertentangan dengan kehendak-kehendaknya Islam. Syarat kesatu tidak, syarat kedua malahan bayangan pun tidak sama sekali.⁴⁸

Bagi Sukarno khalifah di Turki Utsmani hanyalah bahan tertawaan. Ketika menghadapi perang dunia I dan II, khalifah tidak banyak berperan bahkan tidak bisa menyelesaikan negerinya sendiri. Bahkan orang Islam Arab berperang melawan khalifah di Turki. Perang saudara yang terjadi, bukan perang atau *jihad* ideal. Ajakan *jihad* dari Turki juga tidak ada yang mematuhi kecuali tentaranya sendiri. Orang India, Mesir, dan semua jajahan Perancis tidak berperang memperkuat khalifah, tetapi justru menghancurkan khalifah yang tidak berdaya dan tidak berhak dipatuhi umat Islam. Kekhalifahan hanya lah simbol kosong yang tidak relevan dengan zaman dan kemajuan.

Sukarno kembali mengetengahkan bahwa sudah saatnya negara berdasarkan nasionalisme bukan sentimen agama. Mengutip Helide Edib ia mengemukakan bahwa “internasionalisme Islam sudahlah surut, ia punya tempat kini diambillah oleh nasionalisme di kalangan bangsa-bangsa muslimin”. Kekhalifahan sudah mengalami kebangkrutan. Kemal hanyalah menghentikan simbol yang tua itu, dan tanpa itu pun akan runtuh oleh zaman. Kata Sukarno,

Ya sebenarnya justru rakyat jelata Turki itulah mengetahui benar betapa kosongnya kalifah itu, *zonder* banyak mempelajari ilmu sejarah, *zonder* banyak teori-teori, *zonder* mengetahui seribu satu alasan sebagai yang berputar di dalam otaknya pemimpin-pemimpin negara. Sebab, merekalah, mereka, orang-orang tani bodoh dari Anatolia, tukang-tukang air dari Istanbul, kuli-kuli di pelabuhan-pelabuhan, yang di dalam perang besar itu ikut memanggul bedil, mereka mengetahui-apa artinya “khalifah” itu tatkala mereka menembaki atau

⁴⁸Ibid., 438.

ditembali “saudara-saudara Islam” di padang-padang peperangan di Arabia, di Syria, di Irak, atau tempat lain-lain.⁴⁹

Sukarno sekali lagi menegaskan bahwa penghapusan khalifah di Turki tidak mendapat perlawanan dari rakyat. Namun dari para pemimpin agama yang punya kepentingan lah yang bereaksi berlebihan. Sentimen agama ini kemudian juga dibawa ke negeri-negeri di luar Turki. Karena kepentingan mereka sebagai badan yang mengeluarkan fatwa terganggu.

Agama dikembalikan ke zona pribadi atau dalam bahasa Sukarno, agama adalah *privaatzaak*, tiap-tiap penduduk bebas memilih agamanya dan bukan urusan negara. Kebebasan beragama itu sekaligus menghapus peran agama dalam negara, dan sebaliknya, peran negara dalam agama. Ini terjadi pada tahun 1928 di Turki. Sukarno secara dramatis menyajikan respons dan reaksi umat Islam “seluruh dunia Islam gempar. Seluruh dunia Islam berkertak gigi, marah, mengepalkan tinju. Islam dihina, Islam mau dibasmi di negeri Turki”. Namun Sukarno menjawab dengan nada yang tidak kalah retorisnya, dan mengulangi tesis awalnya, bahwa tiada maksud di Turki kala itu untuk membasmi agama. Namun menempatkan agama pada tempatnya, dan menempatkan negara pada tempatnya. Bukan anti-agama, tetapi menolong agama. Islam tidak dipadamkan, begitu kata Sukarno, tetapi Islam dipisahkan dari urusan negara.

Sukarno mengingatkan kembali bahwa agama yang dijadikan alat kekuasaan akan digunakan untuk memerintah dengan tangan besi, begitu kata Essad Bey. Ia juga mengambil contoh Sultan Sulaiman I yang dikenal sebagai *wetgeber*, yang juga sekaligus sebagai penegak syariat. Ini percampuran antara kekuasaan dan agama. Sukarno mengingatkan kembali pepatah, “*Geef de Keizer wat des Keizers is, en God wat Godes is.*”⁵⁰

Sekali lagi pahlawan Sukarno adalah Kemal, dan ia sedang dihujat kala itu. Bagi Sukarno, “Ia adalah orang riil, ia benci kepada orang-orang yang melamun di awang-awang sambil mengatakan bahwa di zaman nabi atau di zaman kalifah yang empat, agama toh bersatu dengan negara. Karena *feiten* di zaman sekarang adalah *feiten* yang lain daripada empat belas abad yang lalu dan *feiten* di

⁴⁹Ibid., 439.

⁵⁰Ibid., 444. Bahasa Belanda yang artinya, “Berikan kaisar haknya, dan Allah hak-Nya juga.”

zaman sekarang itu pun memaksa manusia mengambil tindakan-tindakan secepat kilat. Siapa yang tidak dapat mengambil tindakan seperti kilat di zaman sekarang ini, dia harus terima sahajalah kalau ia pelantingan oleh kilatnya sejarah ke dalam jurangnya kebinasaan dan ketiadaan.”⁵¹

PENUTUP

Untuk era pasca reformasi, ada beberapa gerakan radikal dan konservatif yang merindukan khalifah sebagai ganti dari sistem demokrasi. Sungguh ironi. Suara khalifah muncul di tengah demokratisasi, dan mereka bisa muncul ke permukaan karena berkah demokrasi alam bebas ini. Di era Orde Baru suara khalifah di bungkam dan dienyahkan; namun di era demokrasilah khalifah dapat kesempatan bersuara. Namun mereka ingin mengganti sistem demokrasi itu sendiri. Jelas, dengan meminjam retorika Sukarno ini adalah bentuk “kedurhakaan” pemahaman khalifah terhadap “*democratie*.” Banyak suara pendemo di jalan dengan gaya intimidasi dilakukan organisasi-organisasi anti-Pancasila dan demokrasi menentang dengan alasan khalifah, dan juga rasisme.⁵² Tulisan ini diselesaikan saat ada pemilihan gubernur Jakarta Basuki Cahya Purnama (Ahok). Banyak sekali penolakan terhadap calon gubernur itu karena rasis dan sentimen agamis. Dan demo massal pun diadakan dengan alasan itu. Obat dari semua ini, agar juga demokrasi yang dicita-citakan Sukarno terjadi, adalah membaca karya-karya klasik kita. Misalnya karya Sukarno di atas, juga karya-karya Hatta, Syahrir, Tjokroaminoto, Tan Malaka, Yamin, dan semua pemimpin; itu akan menjadi cara berfikir yang lurus dengan kembali pada jati diri bangsa. Semua diskusi khalifah, Islam dan negara harus dikembalikan ke diskusi dan debat yang panjang di era seratus atau lima puluh tahun yang lalu di Nusantara. Semua pernah dibicarakan, diperdebatkan, dibahas, dan dimusyawarahkan. Generasi kini tidak perlu memulai dari nol lagi untuk menggali makna tertentu dalam bermasyarakat dan bernegara, tetapi memaknai baru, jangan mengulang lagi tema fundamental yang sudah berulang-ulang dikaji para pendahulu tanpa memberi cara pandang baru. Kembalilah pada

⁵¹Ibid., 447.

⁵²Hasani and Naipospos, *Wajah Para “Pembela Islam”*; Woodward M et al., “The Islamic Defenders Front.”

jati diri, kembalilah pada perdebatan lama dengan sadar bahwa itu sudah pernah terjadi. Khalifah menurut Sukarno, perlu dibaca lagi, dan menurutnya sudah tidak relevan seratus tahun yang lalu.

Sistem khalifah di era sebelum kemerdekaan Indonesia sudah mendapat Sukarno, bahwa pemahaman konservatif khalifah tidak sesuai dengan watak kemajuan. Begitu alur berfikir Sukarno yang hendaknya dibaca generasi sekarang, terutama yang merindukan sistem politik lama khalifah dengan. Sukarno sudah lama melihat bahwa khalifah adalah warisan sistem *caesar-papisme* Kristiani yang diteruskan oleh kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Mesir, dan Turki Usmani. Itu semua bukan semata dan satu-satunya yang Islami. Sukarno berargumen pada fakta sejarah dan kenyataan *riil* di masanya, bahwa penghapusan khalifah di Turki sudah selesai dengan semangat zamannya. Sistem lebih maju seperti demokrasi adalah pilihan tak terelakkan. Itu dikatakan dan ditulis Sukarno saat Indonesia belum merdeka. Jika sekarang, hampir seabad setelah Sukarno, orang meneriakan sistem khalifah lagi sebagai sistem politik, berarti seratus tahun mundur jauh dari Sukarno.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuza, Zachary. *Militant Islam in Southeast Asia: Crucible of Terror*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2003.
- Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence in Indonesia*. London; New York: Routledge, 2007.
- Adivar, Halide Edib. *Turkey Faces West*. New Haven; London: Yale University Press; H. Milford, Oxford University Press, 1930.
- Al-Raziq, Ali Abd. *Al-Islam wa Usul al Hukm: Bahth fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Maktabah al-Hayyah, 1966.
- Armstrong, Harold Courtenay. *Turkey in Travail*. London: Lane, 1925.
- Dahm, Bernhard. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence*. Ithaca [N.Y.: Cornell University Press, 1969.

- Dahm, Bernhard. *Sukarnos Kampf um Indonesiens Unabhängigkeit: Werdegang und Ideen Eines Asiatischen Nationalisten*. Frankfurt a.M.; Berlin: Metzner, 1966.
- Essad, and Helmut Ripperger. *Mohammed: A Biography*. New York; Toronto: Longmans, Green and Co., 1936.
- Essad, and Elsa L Talmey. *Blood and Oil in the Orient*. New York: Simon and Schuster, 1932.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1960.
- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi: dalam Masyarakat Jawa*. Edited by Bur Rasuanto. Translated by Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religions Development Marocco and Indonesia*. New Haven [etc.]: Yale University Press, 1968.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University, 2006.
- Hasani, Ismail, and Bonar Tigor Naipospos. *Wajah para "pembela Islam": radikalisme agama dan implikasinya terhadap jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Jabodetabek dan Jawa Barat*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2010.
- Jahroni, Jajang. *Defending the Majesty of Islam: Indonesia's Front Pembela Islam, 1998-2003*. Bangkok, Thailand]; Chiang Mai, Thailand: Asian Muslim Action Network ; Silkworm Books, 2008.
- Kahin, Audrey. "Natsir & Sukarno: Their Clash over Nationalism, Religion and Democracy, 1928-1958." In *Encountering Islam: The Politics of Religious Identities in Southeast Asia*, edited by Yew-Foong, Hui, 191-217. Institute of Southeast Asian Studies, 2012.
- Legge, J. D. *Sukarno: a Political Biography*. New York: Praeger, 1972.

- Legge, John D. *Sukarno*. Lanham: Editions Didier Millet, 2012.
- Makin, Al. *Anti-Kesempurnaan: Membaca, Melihat, dan Bertutur tentang Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Makin, Al. "Are there any Indonesian philosophers? Dealing with a common question and possible answers." *Ulumuna* 20, no. 1 (2016): 1–28.
- Makin, Al. "Benedict XVI and Islam: Indonesian Public Reactions to the Regensburg Address." *Islam and Christian-Muslim Relations* 20, no. 4 (2009): 409–21.
- Makin, Al. *Challenging Islamic Orthodoxy, Accounts of Lia Eden and Other Prophets in Indonesia*. Dordrecht, Holland; Cinnaminson [N.J.], U.S.A.: Springer, 2016.
- Makin, Al. *Keragaman dan Perbedaan, Budaya dan Agama dalam Lintas Sejarah Manusia*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Makin, Al. "Revisiting Indonesian Public Reactions against Danish Cartoons Depicting Prophet Muhammad." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 5, no. 2 (2015): 195–229.
- Penders, C. L. M. *The Life and Times of Sukarno*. Rutherford [N.J.]: Fairleigh Dickinson University Press, 1974.
- Permata, Ahmad Norma. "Ideology, Institutions, Political Actions: Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia." *Asien* 109 (2008): 22–36.
- Ronart, Stephan. *Turkey Today*. London: Robert Hale, 1938.
- Roosa, John. *Pretext for Mass Murder the September 30th Movement and Suharto's Coup D'état in Indonesia*. Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 2006.
- Sukarno. "Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara." In *Dibawah Bendera Revolusi*. 403–47. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.
- Sukarno. "Me-'Muda'-Kan Pengertian Islam." In *Dibawah Bendera Revolusi*. 369–402. Jakarta: Yayasan Bung Karno, 2005.
- Woodsmall, Ruth Frances. *Moslem Women Enter a New World*. New York: Round table Press, 1936.

Woodward M, Coleman D.M, Yahya M, Rohmaniyah I, Lundry C, and Amin A. “The Islamic Defenders Front: Demonization, Violence and the State in Indonesia.” *Contemporary Islam: Dynamics of Muslim Life* 8, no. 2 (2014): 153–71.

